



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 35 (tiga puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Sekretaris Negara RI C. Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet D. Kepala Staf Kepresidenan/Deputi V KSP

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, hari Kamis, 2 Juni 2022, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, dengan agenda pembicaraan

pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp2.273.694.346.000,-** (*dua trilyun dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar **Rp122.150.572.000,-** (*seratus dua puluh dua milyar seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
2. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp548.806.192.677,-** dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp1.957.037.718.000,-** atau sebesar 28.04%, sudah termasuk di dalamnya realisasi anggaran tahun 2022 Kantor Staf Presiden sebesar **Rp37.302.319.112,-** dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp105.784.896.000,-**.
3. Sekretaris Kabinet yang diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Kabinet menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Sekretariat Kabinet sebesar **Rp352.292.228.000,-** (*tiga ratus lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
4. Wakil Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan pengalihan anggaran per program Sekretariat Kabinet dari program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden ke program Dukungan Manajemen sebesar **Rp12.046.603.000,-** (*dua belas milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah*) untuk mengakomodir kebutuhan anggaran integrasi sistem informasi.
5. Wakil Sekretaris Kabinet menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 Sekretariat Kabinet sebesar **Rp135.179.670.956,-** dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp326.315.931.000,-** atau 41.43%.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023:
  - a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp2.273.694.346.000,-** (*dua trilyun dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar **Rp122.150.572.000,-** (*seratus dua puluh dua milyar seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
  - b. Sekretariat Kabinet sebesar **Rp352.292.228.000,-** (*tiga ratus lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

2. Terhadap usulan pengalihan anggaran per program Sekretariat Kabinet dari program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden ke program Dukungan Manajemen sebesar **Rp12.046.603.000,-** (*dua belas milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah*) untuk mengakomodir kebutuhan anggaran integrasi sistem informasi, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2023 yang akan datang.
3. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 sebagai berikut:
  - a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp548.806.192.677,-** dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp1.957.037.718.000,-** atau sebesar 28.04%, sudah termasuk di dalamnya realisasi anggaran tahun 2022 Kantor Staf Presiden sebesar **Rp37.302.319.112,-** dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp105.784.896.000,-**.
  - b. Sekretariat Kabinet sebesar **Rp135.179.670.956,-** dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp326.315.931.000,-** atau 41.43%.

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.33 WIB.

Jakarta, 2 Juni 2022

KETUA RAPAT,



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG

A-270